

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi dari pertumbuhan ekonomi yakni parameter utama yang merepresentasikan ketercapaian ekonomi pada upaya peningkatan kapasitas produksi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Muhamad *et al.*, 2025). Sebab pertumbuhan ekonomi mampu menunjukkan kapabilitas suatu wilayah perihal upayanya mendapat tambahan nilai ekonomi melalui aktivitas produksi yang terus berlangsung (Sima *et al.*, 2023). Sebagai indikator makroekonomi, pertumbuhan ekonomi juga digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan, di mana pertumbuhan yang positif mencerminkan meningkatnya kegiatan ekonomi serta pendapatan masyarakat. Pada konteks daerah, capaian tersebut mampu dilihat pada meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang sekaligus menjadi alat evaluasi efektivitas kebijakan pembangunan yang diterapkan pemerintah daerah (Amalia & Akbar, 2022).

Capaian pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat terpengaruh dari faktor struktural dan kebijakan, terutama peranan pemerintahan memanfaatkan kebijakan fiskal serta pengelolaan keuangan publik yang efektif dan efisien (Christia & Ispriyarso, 2019; Deswira, 2022). Pada konteks desentralisasi fiskal, wewenang pemerintah daerah perihal pengelolaan pendapatan dan belanja sesuai potensi wilayah menjadikan efektivitas kebijakan fiskal sebagai faktor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Sima *et al.*, 2023).

Secara nasional, Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada rentang 2015–2024 menunjukkan pergerakan yang berfluktuatif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perihal pada periode sebelum tahun 2020 (2015–2019), pertumbuhan ekonomi nasional relatif stabil dengan rata-rata sekitar 5,02 persen per tahun. Pada tahun 2020, terjadi suatu kontraksi mengenai pertumbuhan ekonomi sebab munculnya pandemi COVID-19 sebesar –0,7 persen, sebelum kembali meningkat pada periode 2021–2024 dengan rata-rata sekitar 4,77 persen

per tahun, dan belum keseluruhan kembali pada tingkatan sebelum perlambatan ekonomi.

Dalam konteks subnasional, pertumbuhan ekonomi daerah dijadikan parameter esensial guna melakukan penilaian mengenai keberhasilan pembangunan di tingkat provinsi. Amalia & Akbar (2022) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah terpengaruh dari struktur ekonomi, kapasitas fiskal, serta efektivitas kebijakan pemerintah daerah. Sejalan dengan itu, Christia & Ispriyarso (2019) menekankan bahwa dalam kerangka desentralisasi fiskal, kualitas pengelolaan keuangan publik daerah merupakan faktor kunci yang memengaruhi kinerja perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah pada tingkat provinsi mencerminkan adanya perbedaan kinerja yang dipengaruhi oleh variasi struktur ekonomi, kapasitas fiskal, serta efektivitas kebijakan di masing-masing daerah. Perbedaan tersebut tercermin dalam capaian pertumbuhan ekonomi antarprovinsi yang memunculkan variasi pada tiap waktunya. Maka dari itu, penyajian data komparatif antarprovinsi diperlukan guna memberi gambaran yang sistematis perihal dinamika serta pola pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 1.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera Periode 2015-2024 (%)

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	-0,73	3,29	4,18	4,61	4,14	-0,37	2,81	4,21	4,23	4,66
Sumatera Utara	5,1	5,18	5,12	5,18	5,22	-1,07	2,61	4,73	5,01	5,03
Sumatera Barat	5,53	5,27	5,3	5,14	5,01	-1,61	3,29	4,36	4,62	4,36
Riau	0,22	2,18	2,66	2,35	2,81	-1,13	3,36	4,55	4,21	3,52
Jambi	4,21	4,37	4,6	4,69	4,35	-0,51	3,7	5,12	4,67	4,51
Sumatera Selatan	4,42	5,04	5,51	6,01	5,69	-0,11	3,58	5,24	5,08	5,03
Bengkulu	5,13	5,28	4,98	4,97	4,94	-0,02	3,27	4,31	4,28	4,62
Lampung	5,13	5,14	5,16	5,23	5,26	-1,66	2,77	4,28	4,55	4,57
Kep. Bangka Belitung	4,08	4,1	4,47	4,45	3,32	-2,29	5,05	4,4	4,38	0,77
Kep. Riau	6,02	4,98	1,98	4,47	4,83	-3,8	3,43	5,06	5,16	5,02
Indonesia	4,79	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,7	5,31	5,05	5,03

Sumber: BPS Indonesia, 2024

Pulau Sumatera dipahami menjadi suatu kawasan yang strategis mengenai perekonomian nasional disertai dinamika pertumbuhan ekonomi yang beragam antarprovinsi. Berdasarkan data pada Tabel 1.1, perkembangan pertumbuhan ekonomi di berbagai provinsi di Pulau Sumatera pada rentang tahun 2015–2024 memunculkan pola yang berbeda-beda, baik dari sisi arah maupun konsistensinya. Sejumlah provinsi memperlihatkan kecenderungan pertumbuhan yang meningkat secara bertahap setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020, sementara provinsi lainnya menunjukkan pola pertumbuhan yang fluktuatif dan belum sepenuhnya stabil. Variasi arah pertumbuhan ini mencerminkan perbedaan kemampuan masing-masing provinsi dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta mengelola dinamika perekonomian daerah dalam jangka menengah.

Berdasarkan Tabel 1.1, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat selama periode 2015–2019 berada pada kisaran di atas 5 persen dan pada beberapa tahun tercatat lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pada tahun 2020 terjadi suatu kontraksi pada pertumbuhan perekonomian Sumatera Barat yang mencapai 1,61 persen sebagai dampak aktivitas perekonomian yang melambat sebab adanya pandemi COVID-19, meskipun kontraksi ini lebih rendah daripada kontraksi ekonomi nasional dengan besaran 2,07 persen. Pada periode 2021–2024, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mulai menunjukkan proses pemulihan, tetapi perkembangannya masih berfluktuasi. Hal tersebut terlihat dari peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dari 3,29 persen pada tahun 2021 menjadi 4,62 persen pada tahun 2023, kemudian kembali melambat menjadi 4,36 persen pada tahun 2024. Selain itu, pada 2024 capaian pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat menyentuh angka yang kurang dari rata-rata nasional yakni 5,03 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun perekonomian Sumatera Barat telah memasuki fase pemulihan sesudah muncul kontraksi pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonominya belum menunjukkan kestabilan serta terdapat di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

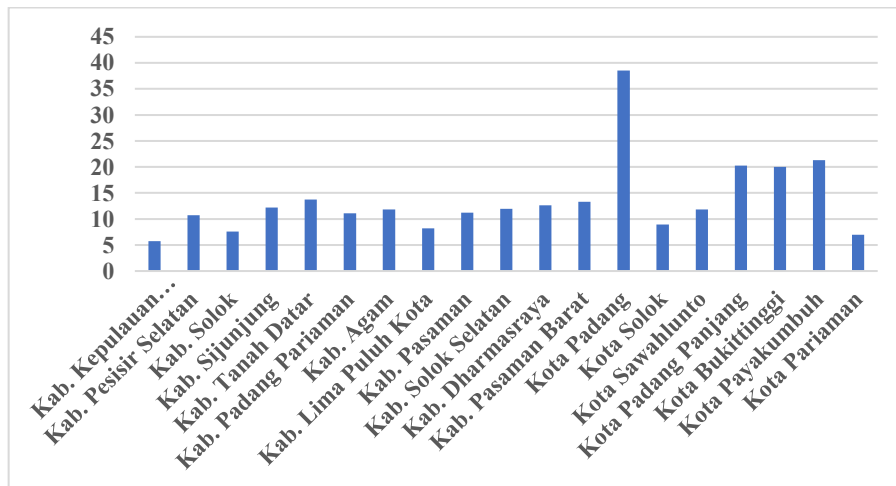
Berdasarkan kondisi tersebut, capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang kurang dari rata-rata nasional memberikan penjelasan mengenai kinerja perekonomian daerah yang terpengaruh pada kondisi

makroekonomi nasional, serta dari berbagai faktor internal yang dimiliki masing-masing daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dipahami menjadi suatu faktor internal yang mampu memberikan pengaruhnya pada pertumbuhan perekonomian daerah. Baiknya suatu tindakan pengelolaan keuangan daerah menjelaskan kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah mengenai optimalisasi berbagai sumber pendapatan serta pengalokasian belanja yang dilaksanakan dengan ketepatan sasaran guna mendukung pembangunan ekonomi. Christia & Ispriyarso (2019) menegaskan bahwa kualitas pengelolaan fiskal daerah memengaruhi kapabilitas pemerintah daerah pada upayanya membiayai pengeluaran publik yang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi suatu parameter yang mampu merepresentasikan fiskal pemerintah daerah. PAD dipahami menjadi sumber penerimaan bersumber dari potensi perekonomian lokal serta mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai tindakan menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan dengan mandiri. Makin besarnya kontribusi PAD atas total pendapatan daerah dapat dipahami makin tingginya kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah daerah sehingga mampu meminimalisasi ketergantungan dengan dana transfer pemerintah pusat. Atas dasar ini, upaya optimalisasi PAD dinilai sebagai faktor esensial guna menguatkan kemandirian fiskal serta meningkatkan kapabilitas pemerintah daerah guna melaksanakan pembangunan dengan efek kontinu.

Tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah diukur melalui rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio ini memiliki kemampuan dalam merepresentasikan kapabilitas pemerintah daerah guna pembiayaan kebutuhan pengeluarannya dengan mengandalkan PAD, sehingga mampu mengurangi ketergantungannya atas dana transfer pusat. Makin tingginya rasio kemandirian keuangan berdampak pada makin besarnya fleksibilitas pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan ciri serta keperluan suatu daerah. Christia & Ispriyarso (2019) menyatakan bahwa tingginya tingkat kemandirian fiskal mampu memberi suatu ruang lebih luas untuk pemerintah daerah guna menjalankan perumusan kebijakan pembangunan ekonomi. Sejalan

dengan itu, Amalia & Akbar (2022) menjelaskan perihal terdapatnya pengaruh rasio kemandirian pada pertumbuhan ekonomi sebab merepresentasikan kapasitas fiskal daerah guna mendukung pembiayaan pembangunan yang bersifat produktif.



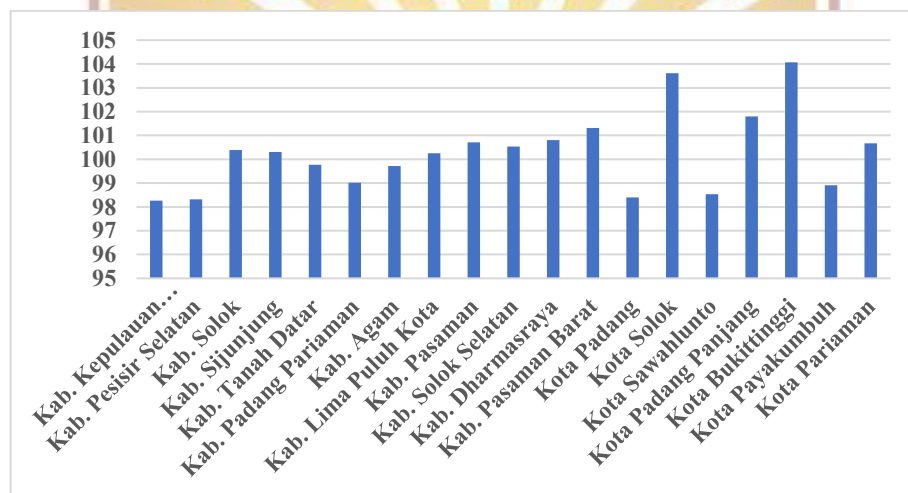
Gambar 1.1 Rata-Rata Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Data Diolah dari DJPK, 2026

Berdasarkan Gambar 1.1, rata-rata rasio kemandirian keuangan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada rentang tahun 2020–2024 masih terdapat pada kategorisasi sangat rendah, yaitu sebesar 13,58 persen. Selain itu, terdapat disparitas tingkat kemandirian fiskal antar daerah, di mana Kota Padang rasio kemandiriannya lebih tinggi daripada wilayah yang lain, sedangkan mayoritas kabupaten masih mencatat rasio di bawah 15 persen. Munculnya kondisi ini memberi penjelasan perihal terbatasnya kontribusi PAD atas total pendapatan daerah yang membuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri belum optimal. Akibatnya, muncul keterbatasan pada ruang fiskal pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan serta bergantung pada data transfer pusat yang relatif tinggi. Kondisi tersebut diduga turut kapabilitas pemerintah daerah dalam menunjang pertumbuhan perekonomian.

Selain kemampuan meningkatkan kapasitas pendapatan melalui PAD, keberhasilan pemerintah daerah dalam menunjang pertumbuhan perekonomian juga dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan belanja daerah. Tingginya

pendapatan daerah tidak selalu mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila tidak diikuti dengan pengalokasian belanja yang efisien, tepat sasaran, serta mempunyai efektivitas tinggi. Maka dari itu, rasio efisiensi dipandang sebagai parameter esensial guna mengevaluasi mutu pengelolaan keuangan daerah. Sevigo & Lathifah (2024) menyatakan bahwa pengelolaan belanja yang efisien dapat memunculkan peningkatan mutu pelayanan publik serta menaikkan aktivitas perekonomian masyarakat. Temuan ini memiliki kesepahaman dengan studi dari Deswira (2022) yang menunjukkan efisiensi pengelolaan belanja daerah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.



Gambar 1.2 Rata-Rata Rasio Efisiensi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Data Diolah dari DJPK, 2026

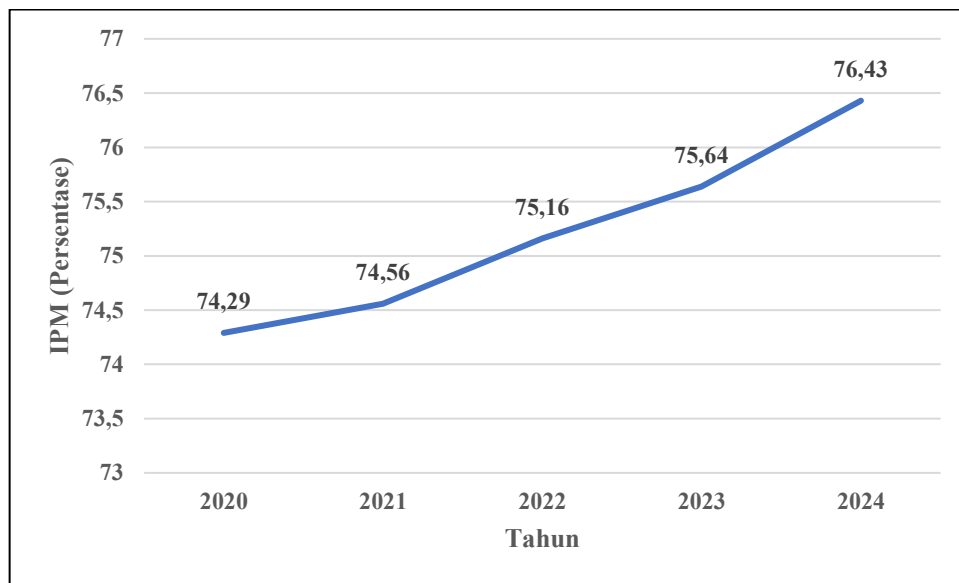
Berdasarkan Gambar 1.2, rata-rata rasio efisiensi keuangan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020–2024 mencapai 100,28 persen. Berdasarkan kriteria rasio efisiensi, nilai ini dikategorikan tidak efisien sebab terdapat di atas 100 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan mengenai lebih besarnya realisasi belanja daerah daripada pendapatan yang tersedia, yang membuat belum optimalnya pengelolaan anggaran. Meskipun terdapat variasi tingkat efisiensi antar daerah, secara umum kondisi ini mencerminkan kapabilitas pemerintah daerah ketika mengendalikan belanja yang memerlukan peningkatan

agar pemanfaatan sumber daya keuangan mampu berkontribusi dengan optimal atas pertumbuhan ekonomi.

Meskipun rata-rata tingkat kemandirian fiskal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat masih berada pada kategori sangat rendah dan pengelolaan belanja daerah belum menunjukkan tingkat efisiensi yang optimal, pertumbuhan ekonomi daerah pada periode 2021–2024 tetap mengalami pemulihan setelah kontraksi pada tahun 2020, meskipun laju pertumbuhannya masih berfluktuasi. Kondisi ini mengindikasikan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah yang pengaruhnya tidak terbatas pada aspek kinerja keuangan, melainkan dapat terpengaruh dari berbagai faktor lain di luar aspek fiskal.

Berbagai faktor nonkeuangan diketahui turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi, misalnya investasi, tenaga kerja, infrastruktur, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Di antara berbagai faktor tersebut, kualitas SDM yang diproksikan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipandang memiliki peranan yang strategis karena merepresentasikan capaian pembangunan pada aspek pendidikan, kesehatan, serta standarisasi hidup layak. Dibandingkan indikator nonkeuangan lainnya yang hanya merepresentasikan satu aspek pembangunan, IPM dapat merepresentasikan penggambaran dengan lebih mendalam perihal mutu SDM yang secara teoritis mempunyai peranan guna menaikkan daya saing, produktivitas, dan kapasitas masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

IPM dipahami menjadi suatu parameter komposit dalam pengukuran capaian pembangunan manusia yang didasarkan tiga aspek, yakni pendidikan, kesehatan, serta standarisasi hidup layak. Peningkatan mutu SDM pada teori pertumbuhan endogen berperan pening guna menaikkan produktivitas tenaga kerja, memunculkan inovasi, serta menguatkan daya saing daerah sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Atas dasar ini, IPM dipandang menjadi indikator yang relevan untuk merepresentasikan pengaruh aspek nonkeuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.



Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat Periode 2020-2024

Sumber: BPS Sumbar, 2024

Gambar 1.3 menyajikan IPM Provinsi Sumatera Barat pada rentang tahun 2020–2024 terlihat tren yang meningkat, awalnya 74,29 pada tahun 2020 menjadi 76,43 pada tahun 2024. Kenaikan IPM tersebut memaparkan adanya pemulihan berkelanjutan dalam mutu SDM yang secara teoritis mampu menaikkan produktivitas tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Jika ditinjau dari kriteria IPM, capaian tersebut terdapat di kategorisasi yang tinggi yakni $70 \leq \text{IPM} < 80$, yang memberi penjelasan mengenai relatif baiknya tingkat pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat, meskipun belum mencapai kategori sangat tinggi. Kondisi ini memberi penjelasan mengenai berkembangnya mutu dari kesehatan, pendidikan, serta standar hidup masyarakat secara positif dan mampu mendukung aktivitas ekonomi yang lebih produktif.

Berbagai kajian empiris menjelaskan terdapatnya pengaruh positif dari IPM atas bertumbuhnya ekonomi. Istianto *et al.* (2021) memaparkan temuannya mengenai terdapatnya pengaruh positif signifikan pada IPM terkait dengan pertumbuhan ekonomi daerah, karena meningkatnya mutu kesehatan dan pendidikan yang mampu menaikkan produktivitas dari tenaga kerja serta memperluas aktivitas ekonomi. Winarti *et al.* (2022) juga menemukan temuan yang

sepaham yakni terdapatnya pengaruh positif signifikan pada IPM terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi, sehingga peningkatan mutu SDM ini dinilai sebagai faktor esensial pada upaya menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi yang kontinu.

Berdasarkan uraian fenomena yang telah dipaparkan, dinamika pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat memperlihatkan bahwa kinerja keterkaitan ekonomi daerah tidak terbatas kapabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas SDM. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena yang bersifat multidimensional sehingga perlu dikaji melalui berbagai perspektif, baik dari aspek fiskal maupun nonfiskal. Atas dasar ini, analisis empiris dibutuhkan guna mendapatkan pemahaman dengan lebih mendalam perihal berbagai faktor yang mampu memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, fokus penelitian ini yakni terdapat pada berbagai variabel yang mampu merepresentasikan aspek fiskal dan nonfiskal dalam menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu rasio efisiensi keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, serta IPM. Rasio kemandirian digunakan sebagai indikator yang merepresentasikan kapasitas fiskal dari sisi pendapatan melalui kemampuan pemerintah daerah guna melakukan optimalisasi PAD. Sementara itu, rasio efisiensi digunakan untuk menggambarkan mutu dalam mengelola belanja daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan. Adapun IPM dipilih sebagai indikator nonkeuangan karena merupakan indeks komposit yang merepresentasikan mutu SDM dengan melalui aspek pendidikan, kesehatan, serta standar hidup layak, yang secara teoritis memiliki keterkaitan erat pada peningkatan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi.

Pembatasan variabel kinerja keuangan pada rasio kemandirian dan rasio efisiensi dilakukan untuk memusatkan analisis pada dua fungsi utama kebijakan fiskal daerah, yaitu kapabilitas pemerintah daerah guna menghasilkan pendapatan serta efektivitas pengelolaan belanja. Kedua indikator tersebut dipandang telah mampu merepresentasikan kapasitas fiskal daerah secara lebih menyeluruh karena menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan dari sisi penerimaan maupun

pengeluaran. Atas dasar ini, hubungan yang mencakup kinerja keuangan daerah dengan pertumbuhan perekonomian dapat dianalisis secara lebih terarah dan mendalam.

Dengan mengambil objek penelitian pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020–2024, penelitian ini mempunyai urgensi yang kuat mengingat pertumbuhan ekonomi daerah masih menunjukkan pola yang berfluktuasi, sementara tingkat kemandirian fiskal relatif rendah, pengelolaan belanja belum sepenuhnya efisien, dan kualitas sumber daya manusia terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembuktian empiris mengenai sejauh mana faktor-faktor fiskal dan nonfiskal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperdalam kajian empiris mengenai determinan pertumbuhan ekonomi daerah, serta mampu dijadikan bahan pertimbangan untuk pemerintah daerah dalam melakukan perumusan kebijakan pembangunan yang fokusnya menguatkan kapasitas serta menaikkan kualitas SDM guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat penjelasan mengenai latar belakang penelitian, permasalahan utama yang menjadi perhatian penelitian ini dapat dirumuskan dengan cara berikut:

1. Bagaimana pengaruh rasio kemandirian sebagai indikator kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh rasio efisiensi sebagai indikator kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh IPM terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Melihat pengaruh rasio kemandirian sebagai indikator kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Melihat pengaruh rasio efisiensi sebagai indikator kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Melihat pengaruh IPM terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pelaksanaan penelitian ini memuat harapan dalam berkontribusi pada upaya mengembangkan kajian ekonomi pembangunan daerah, khususnya yang memiliki korelasi pada peran kebijakan fiskal daerah serta kualitas SDM guna menaikkan pertumbuhan ekonomi. Pada aspek teoritis, pelaksanaan dari penelitian ini memperkaya literatur empiris perihal hubungan yang mencakup kinerja keuangan daerah dari sisi pendapatan (rasio kemandirian) dan sisi belanja (rasio efisiensi) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota.

Selain itu, dengan memasukkan IPM yang dijadikan variabel nonkeuangan, mampu memberi perspektif dengan lebih mendalam perihal determinan pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak bertumpu pada aspek fiskal saja, melainkan mengenai aspek kualitas pembangunan manusia. Hasil yang didapat mampu memperkuat atau mengklarifikasi perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh kinerja keuangan daerah dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam konteks kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

2. Manfaat Praktis

Pada praktisnya, temuan yang didapat diharapkan mampu bermanfaat untuk berbagai pihak sebagai berikut:

- a. Pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat: Temuan yang didapat mampu berguna menjadi bahan dalam mempertimbangkan upaya menyusun kebijakan fiskal daerah, terutama mengenai upaya menaikkan kemandirian keuangan melalui optimalisasi PAD serta meningkatkan efisiensi belanja daerah.

Informasi empiris mengenai pengaruh rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat membantu pemerintah daerah guna menyusun prioritas kebijakan pembangunan dengan keefektifan lebih tinggi serta berfokus dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi.

- b. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat: Penelitian ini mampu dijadikan masukan dalam upaya menyusun dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah, khususnya pada usaha menaikkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota secara lebih merata. Temuan yang didapat juga mampu dimanfaatkan menjadi dasar pada upaya memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan pembangunan manusia antardaerah di Provinsi Sumatera Barat.
- c. Akademisi, peneliti, dan mahasiswa: Penelitian ini memiliki kegunaan mengkaji sumber referensi ilmiah serta bahan kajian bagi tindakan mengembangkan penelitian, terutama yang berkorelasi pada ekonomi pembangunan daerah, desentralisasi fiskal, dan pembangunan manusia. Penelitian ini dapat meluaskan memperluas wawasan empiris perihal berbagai faktor yang mampu memberi pengaruhnya pada pertumbuhan perekonomian daerah pada tingkat kabupaten/kota.

